

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI DISTRIK MORAID KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT

Oleh

Franklin Deano Jekwam¹
Tjahya Supriatna², Sampara Lukman³

¹⁾ Pemerintah Kabupaten Tambrauw
Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
angkimapd@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

Implementation of the Special Autonomy Policy in Education Essentially it has the aim of giving authority to the government in advancing education as mandated in law 21 of 2001. Problems Education in Moraid District is a classic problem that we often encounter, among others, lack of educators, facilities and infrastructure. less support to the education budget that needs serious attention and supervision from the regional government and the education office. Therefore education services are very important and become the government's priority for basic education. So that students receive the benefits of decent education services like children in general. With the implementation of this policy the expected results are the advancement of aspects of quality and competent human resources, improvement in the quality and quality of good education to supporting facilities for educators and students, namely students, among others. Official houses, library facilities and school laboratories. In this study using qualitative methods that describe the implementation of special autonomy policies in basic education and the factors that influence the implementation of basic education policy in the Moraid District of Tambrauw District, in this study based on the purpose of the research purposive sampling technique in accordance with research interests. The impact of the benefits of implementing this policy is the creation of quality and competent human resources, the development of sustainable education and the improvement of facilities and infrastructure to supporting facilities for basic education in the Moraid District, Tambrauw District. This study concludes that the implementation of the special autonomy policy in basic education runs as programmed but is still constrained by funding and supervision of professional teaching staff so that the implementation of this policy can be effective and efficient.

Keywords: implementation, basic education, special autonomy.

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dasar esensinya memiliki tujuan di mana memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam memajukan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. Permasalahan Pendidikan di Distrik Moraid merupakan masalah klasik yang sering kita temui, antara lain kekurangan tenaga pendidik, sarana prasarana yang kurang menunjang hingga anggaran

pendidikan yang perlu menjadi perhatian dan pengawasan serius dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Oleh sebab itu pelayanan pendidikan merupakan hal yang sangat penting serta menjadi prioritas pemerintah khusus pendidikan dasar. Agar siswa/siswi menerima manfaat layanan pendidikan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Dengan pelaksanaan kebijakan ini hasil yang diharapkan adalah kemajuan aspek sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang baik hingga fasilitas pendukung tenaga pendidik serta peserta didik, yaitu siswa/siswi antara lain. Rumah dinas, fasilitas perpustakaan hingga laboratorium sekolah. di dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan implementasi kebijakan Otsus bidang pendidikan dasar serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan dasar pada Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw, pada penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian teknik *purposive sampling* sesuai dengan kepentingan penelitian. Dampak manfaat dari Implementasi kebijakan ini adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, pembangunan pendidikan yang berkelanjutan serta peningkatan sarana dan prasarana hingga fasilitas penunjang bagi pendidikan dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa implementasi kebijakan Otsus bidang pendidikan dasar berjalan sebagaimana telah diprogramkan namun masih terkendala dari pendanaan serta pengawasan terhadap tenaga profesi pendidik agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kata kunci: implementasi, pendidikan dasar, otonomi khusus

PENDAHULUAN

Otonomi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dengan negara yang mempunyai luas wilayah, penduduk yang banyak serta pulau terbanyak dan suku yang beraneka ragam seperti Indonesia. Otonomi sendiri diartikan sebagai pemberian hak wewenang dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pengalaman orde baru dengan pendekatan sentralisasi ternyata tidak mampu membendung gejolak daerah-daerah yang menginginkan keadilan antara pusat dan daerah, dikarenakan melalui pendekatan *top down* tersebut setiap daerah di Indonesia hanya bisa memajukan daerahnya dengan mengikuti segala aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Daerah tidak dapat menggali potensi yang dimiliki guna memajukan masyarakat daerahnya.

Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 "Pasal 18" yang berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah

besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengikuti dasar terkait dengan fakta ketertinggalan serta ketimpangan yang ada di Provinsi Papua Barat, merupakan provinsi di wilayah timur Indonesia yang menghadapi berbagai persoalan mendasar terkait dengan fakta ketertinggalan wilayah. Daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam (SDA) ternyata pada tataran riil menghadapi fakta yang bertolak belakang.

Pendidikan masih menjadi barang yang mewah di Kabupaten Tambrauw khususnya Distrik Moraid. Begitu juga di wilayah distrik lainnya khususnya di daerah pedalaman dan pesisir pantai Kabupaten Tambrauw, dan umumnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Entah sampai kapan kondisi seperti ini bisa dicapai, tetapi yang pasti upaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai jenjang pendidikan semakin intensif dilakukan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Tambrauw khususnya di Distrik Moraid.

Pendidikan di Kabupaten Tambrauw secara umum dan terkhusus di Distrik Moraid masih berkutat pada masalah klasik antara

lain ketersediaan tenaga guru yang kurang dan sangat tidak merata. Banyak siswa kelas enam SD yang belum tau membaca, minimnya fasilitas penunjang serta masih rendahnya kualitas lulusan. Potret pendidikan di Kabupaten Tambrauw khususnya Distrik Moraid masih memprihatinkan, Keterpurukan kompetensi guru atau mutu guru di Kabupaten Tambrauw khususnya di Distrik Moraid disebabkan karena banyak faktor. Faktor mendasar mutu kualitas guru antara lain sebagai berikut.

1. Sekitar delapan puluh persen guru (khususnya guru SD dan SMP) yang ada Distrik Moraid adalah guru-guru produk paradigma pendidikan lama (antara tahun 70-an sampai 90-an) proses pembelajaran yang dilakukan juga adalah cara yang mereka terima di bangku sekolah puluhan tahun yang lalu.
2. Lemahnya penguasaan bahan yang diajarkan, jangkakan penguasaan paradigma pendidikan dan kurikulum terbaru, bahan yang harus diajarkan penguasaannya masih lemah akibat dari itu situasi pembelajaran yang terjadi adalah MSH (mencatat sampai selesai) pembelajar tidak pernah tahu untuk apa dia belajar apalagi mengerti apa yang dicatat, tidak banyak siswa yang lolos di sini.
3. Ketidakesesuaian bidang studi yang dipelajari guru dengan yang diajarkan sekolah.
4. Para guru jarang belajar dari keberhasilan dan kegagalan dari pembelajaran yang mereka lakukan.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan (*action*) untuk mencapai tujuan

diselenggarakan pada tahap implementasi kebijakan.

Menurut Marilee. S Grindle (1980: 11) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi dua variabel yang fundamental yakni (1) kebijakan (*content of policy*) dan (2) lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Isi kebijakan (*content of policy*) antara lain mencakup hal-hal berikut.

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group;
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan merubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit di implementasikan dari pada program yang sekadar memberikan bantuan kredit kepada masyarakat miskin;
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat;
- 5) Apakah sebuah program telah menyebutkan implementasinya dengan rinci;
- 6) Apakah sebuah program didukung dengan sumber daya yang memadai.

Adapun variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- 1) Seberapa besar, kekuasaan kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 2) Karakteristik dan rezim yang sedang berkuasa;
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok.

Kebijakan Otonomi Khusus di Papua Barat

Kebijakan umum pemerintahan dan pembangunan di Papua Barat adalah kebijakan otonomi khusus yang diterapkan

secara resmi melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Pada regulasi ini yang dimaksud yang dimaksud dengan *otonomi khusus* adalah “kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua. Disebut sebagai “Otonomi Khusus” karena memberikan perlakuan yang khusus, dalam arti mendapatkan prioritas dukungan yang lebih banyak dari pada daerah lain.

Pandangan Labolo yang melihat aspek sosiologis, politik, ekonomi serta pengungkapan secara terang tentang ketimpangan yang terjadi di Provinsi Papua, menyadari hal-hal yang sebenarnya mendasari lahirnya Otsus Papua. Sebagaimana dikemukakan pada bagian penjelasan UU Otsus, hal-hal mendasar yang menjadi isi undang-undang ini adalah sebagai berikut. **Pertama**, pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah Provinsi Papua maupun Papua Barat serta penerapan kewenangan tersebut yang dilakukan dengan kekhususan. **Kedua**, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar.

Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berciri:

1. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama maupun kaum perempuan;
2. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Papua pada umumnya dengan

berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat;

3. Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Keempat, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta majelis rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Pelayanan Publik

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Wasistiono dalam Hardiyansyah (2011: 11) adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintahan ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat yang berbeda dengan pendapat di atas. Sementara itu, pelayanan umum menurut Moenir (2010: 26) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan dengan haknya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan pemberian layanan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu pemerintah, BUMN, dan BUMD yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas dalam pelayanan publik maupun jasa publik dengan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Pembangunan Nasional di Bidang Pendidikan

Sejalan dengan perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi yang

semakin canggih pada era globalisasi ini, dibutuhkan kemampuan Manajemen yang kuat dan perspektif luas dalam menjalankan roda pemerintahan. di samping itu diperlukan sistem kesejahteraan yang optimal, motivasi sesuai dengan prestasi yang dicapai agar orang-orang berprestasi dapat tetap dipertahankan kemampuan dan juga meningkatkan personel dengan menentukan pendidikan apa yang dibutuhkannya.

Sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintah pusat dan DPR sebetulnya telah menyiapkan perangkat regulasi tentang desentralisasi pendidikan. Antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang program pembangunan Nasional (Propenas). Dalam Propenas desentralisasi pendidikan tidak hanya menyangkut jenjang SD hingga SLTA, tetapi juga perguruan tinggi negeri melalui apa yang disebut dengan Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Pendidikan pada dasarnya bertujuan membimbing manusia ke arah kemampuan yang bertanggung jawab secara logika, etika, dan estetika melalui pertimbangan akademik atas kemampuan terampil (talenta) yang dimilikinya. Menurut Kartono (dalam Langevald, 1997: 15) pendidikan terdiri atas tiga pengertian, yaitu:

1. Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.
2. Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya, agar dibisa mandiri, akil balig dan bertanggung secara susila.
3. Pendidikan adalah usaha mencapai penentuan diri susila dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat ahli dan regulasi kebijakan pendidikan yang digariskan pemerintah tentang mekanisme pendidikan di atas dapat ditarik simpulan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan manusia melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan dalam

rangka menyiapkan peserta didik yang diharapkan nantinya dapat berperan dalam profesi masing-masing.

KERANGKA PEMIKIRAN

Hambatan utama terhadap pendidikan di Tambrauw khususnya di Distrik Moraid antara lain adalah terbatas akses pendidikan baik karena faktor-faktor fisik maupun non fisik. Karakteristik wilayah Distrik Moraid sangat membatasi kesempatan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Laporan USAID (*United States Agency for International Development*) jarak dari sekolah sebagai alasan utama banyaknya angka putus sekolah, akan tetapi sebagian besar siswa tinggal di kampung-kampung terpencil.

Sementara hambatan-hambatan fisik merupakan faktor kritis memengaruhi akses, faktor-faktor nonfisik, seperti berbagai bentuk diskriminasi juga berkontribusi terhadap tingkat putus sekolah, selain itu kualitas pendidikan formal di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw dibatasi oleh kurangnya tenaga guru dan tantangan keterpencilan, yaitu fasilitas dan infrastruktur sekolah.

Dampak pada kualitas mengajar menjadi terpengaruh, terutama pengawasan di wilayah Distrik Moraid juga terbatas. Orang tua sering kali melaporkan ketidakhadiran guru yang sistematis dan berkepanjangan. Kemudian kurikulum sekolah yang tidak relevan dengan lokal dan mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tujuan pendidikan.

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Tambrauw khususnya Distrik Moraid menjadi fokus utama selain bidang ekonomi, kualitas pendidikan di Distrik Moraid memang tidak tertinggal dibandingkan kualitas pendidikan di wilayah lain, hanya saja polanya dan tidak meratanya saja yang menjadi permasalahan. Untuk Moraid yang tertinggal jauh dari pusat pemerintahan, kualitas pendidikannya memang belum sangat maju, selain fasilitas

pendidikan yang masih sangat kurang mendukung, seperti kurangnya pusat pembelajaran dan terkadang kurangnya tenaga pengajar juga masih menjadi salah satu kendala majunya kualitas pendidikan di Distrik Moraid.

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang benar dan maksimal sangat diperlukan adanya desain penelitian yang sesuai dengan situasi dan objek yang akan diteliti. Rancangan penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi: dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian, maka harus ditentukan sumber data yang digunakan, sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data maka perlu diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu, *person*, *place* dan *paper*.

1. *Person* (orang)

Sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan Otsus dalam proses pelayanan publik (studi tentang pelayanan pendidikan).

2. Sumber data *person* (orang dalam penelitian ini adalah):

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw.
- b. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw.
- c. Kepala Sekolah SD Inpres 8 Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw.

- d. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Moraid Kabupaten Tambrauw.
- e. Guru-guru SD Inpres 8 Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw.
- f. Guru-guru SMP Negeri 1 Moraid Kabupaten Tambrauw.
- g. Perwakilan kepala kampung distrik moraid Kabupaten Tambrauw.
- h. Perwakilan orang tua murid di SD Inpres 8 dan SMP Negeri 1 Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw.

3. *Place* (Tempat))

Sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak yang merupakan objek untuk penggunaan metode observasi.

Adapun Lokasi yang dimaksud adalah Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw yang merupakan fokus lokus penelitian dan Sekolah Dasar di Distrik Moraid.

4. *Paper* (Dokumen Tertulis)

Sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Sumber data bentuk ini, peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam empat tipe dasar, yaitu *observation interviews*, *document* dan *visual images* dengan demikian dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Sugiyono (2007: 61) dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan data.

1. Memiliki daya responsif yang tinggi, yaitu mampu merespons sambil memberikan interpretasi terus-menerus pada gejala yang dihadapi;

2. Memiliki sifat adaptabel, yaitu menyesuaikan diri, mengubah taktik atau strategis mengikuti kondisi lapangan yang dihadapi;
 3. Memiliki kemampuan untuk memandang objek penelitiannya secara holistik, mengaitkan gejala dengan konteks saat itu mengaitkan dengan masa lalu, dan konteks yang relevan;
 4. Sanggup terus menerus menambah pengetahuan untuk bekal dalam interpretasi terhadap gejala;
 5. Memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi agar dengan cepat menginterpretasi, selanjutnya juga peneliti juga mengharapkan memiliki kemampuan menarik simpulan mengarah pada perolehan hasil;
 6. Memiliki kemampuan untuk mengeksplor dan merumuskan informasi sehingga menjadi bahan masukan bagi pengayaan ilmu.
- Dengan demikian, peneliti sendiri berfungsi sebagai instrumen penelitian dalam semua proses baik dalam kegiatan pelayanan pendidikan, wawancara maupun pencatatan data yang diperlukan untuk mendapatkan data yang benar.
- Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw, SMP Negeri 1 Moraid dan SD Inpres 8 Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw.
- ### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
- Hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan Otsus dalam proses pelayanan publik bidang pendidikan dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat, disimpulkan sebagai berikut.
- Pertama**, Implementasi Kebijakan Otsus dalam Proses Pelayanan Publik Bidang Dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw dilihat dari dua faktor, yaitu *content of policy* dan *context of implementation*, sebagaimana dijelaskan berikut ini.
- a) Kepentingan yang memengaruhi; kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat di distrik dan kampung dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang menjadi usulan masyarakat selama ini terabaikan atau tidak pernah terakomodir pada saat Musrenbang tingkat kecamatan maupun kabupaten.
 - b) Tipe manfaat; terdapat dua manfaat yang dihasilkan dari penerapan implementasi kebijakan bidang pendidikan dasar ini yakni manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi pemerintah.
 - c) Derajat perubahan yang diinginkan, pelayanan pendidikan dasar berjalan dengan baik, peningkatan mutu guru, sarana prasarana serta fasilitas penunjang adalah harapan masyarakat yang ingin direalisasikan agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.
 - d) Letak pengambilan keputusan: Implementasi Kebijakan Otsus Bidang Pendidikan Dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw adalah mutlak kebijakan dari Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati. Selaku pembuat kebijakan (*policy maker*).
 - e) Pelaksana program adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Tambrauw dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw, pembangunan sumber daya manusia serta pemerataan pendidikan di seluruh Kabupaten Tambrauw.
 - f) Sumber daya yang dilibatkan dalam Implementasi Kebijakan Otsus Bidang Pendidikan Dasar, masyarakat dilibatkan seutuhnya dalam proses pelayanan serta meningkatkan partisipasi mereka dalam menerima pelayanan pendidikan yang diberikan pemerintah.
 - g) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat: dalam implementasi

kebijakan Otsus Bidang Pendidikan Dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw mendapat respons dan dukungan yang positif terutama masyarakat selaku sasaran dan penerima manfaat dari implementasi kebijakan tersebut sehingga pelayanan pendidikan dasar di wilayah Distrik berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

- h) Karakteristik lembaga dan penguasa, Implementasi Kebijakan Otsus dalam Proses Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw, dilakukan dengan baik oleh lembaga dan institusi dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Tambrauw sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.
- i) Kepatuhan dan daya tanggap, apa yang diinginkan masyarakat sebagai sasaran dan penerima manfaat dari implementasi kebijakan tersebut sudah dilakukan oleh pelaksana kebijakan (Implementor policy).

Kedua, faktor pendukung Implementasi Kebijakan Otsus Dalam Proses Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw adalah sebagai berikut.

- a) Dukungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw dalam Implementasi Kebijakan Otsus Bidang Pendidikan Dasar, berupa peningkatan pelayanan pendidikan kepada wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau akibat kondisi geografis yang berat, dan bantuan anggaran pendidikan baik dari APBD maupun dari alokasi otonomi khusus demi menunjang segala bentuk pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.
- b) Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Pengajar sebagai Implementor, serta Pemerintah Distrik dan Pelaksanaan Program, yaitu pihak sekolah dasar.

- c) Adanya Partisipasi Masyarakat dalam mendukung setiap program pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah.

Adapun faktor penghambat Implementasi Kebijakan Otsus Dalam Proses Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw adalah sebagai berikut.

- a) Minimnya anggaran dalam menunjang tiap proses implementasi kebijakan pelayanan bidang pendidikan dasar di wilayah distrik maupun kampung.
- b) Mentalitas ASN dan masyarakat.
- c) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat akan pentingnya pelayanan pendidikan.
- D) Masih rendahnya kemampuan dan kompetensi guru dalam memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini, dan juga fasilitas pendukung dalam menunjang proses belajar mengajar.

Ketiga, upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Otsus dalam proses pelayanan publik bidang pendidikan dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw.

- a) Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw untuk memprioritaskan pelayanan pendidikan bagi Kabupaten Tambrauw terkhusus Distrik Moraid dan juga ingin menaikkan anggaran bidang pendidikan baik dari APBD maupun alokasi khusus yang bersumber dari Otsus guna menjawab kekurangan pelayanan serta menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di wilayah Distrik Moraid terkait pelayanan pendidikan dasar.
- b) Aparatur sipil negara (ASN) diberikan teguran, peringatan, pembinaan dan sanksi sesuai peraturan kepegawaian.
- c) Pemerintah terus mengajak, mengarahkan dan menarik simpati

masyarakat baik melalui sosialisasi, pemberitahuan, atau rapat-rapat di sekolah, di kantor distrik maupun di tingkat kabupaten sehingga masyarakat dapat terpanggil dan merasa bahwa pelayanan pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting.

- d) Pemberian kegiatan pelatihan seperti Bimbingan Teknis dan pendidikan bagi guru dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi guru untuk memberikan pelayanan pengajaran kepada siswa/siswa di distrik moraid Kabupaten Tambrauw.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw selaku pembuat kebijakan (*policy maker*) dan Pemerintahan Distrik Moraid serta Sekolah Dasar yakni SD Inpres 8 Moraid dan SMP Negeri 1 Moraid selaku pelaksana kebijakan (*implementor policy*) Implementasi Kebijakan Otsus Bidang Pendidikan Dasar sebagai berikut.

Pertama, perlunya perhatian lebih dan serius Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw dalam Implementasi Kebijakan Otsus Bidang Pendidikan Dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw dari faktor isi kebijakan maupun faktor konteks implementasinya, yaitu:

- a) Kepentingan yang memengaruhi; merubah kepentingan pemerintah daerah yakni tidak hanya menjawab usulan-usaln masyarakat bersifat fisik maupun non fisik peningkatan pelayanan pendidikan dan pemberdayaan siswa/siswi dalam peningkatan mutu pendidikan.
- b) Tipe manfaat; lebih memaksimalkan manfaat dari penerapan implementasi kebijakan Otsus bidang pendidikan dasar terutama manfaat bagi masyarakat.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan; penambahan alokasi anggaran di

setiap sekolah dasar agar peningkatan pelayanan yang diinginkan dapat terlihat.

- d) Letak pengambilan keputusan, sedapat mungkin kebijakan dapat diambil berdasarkan temuan di lapangan dan punya dampak positif bagi masyarakat banyak.
- e) Pelaksana Program; peningkatan kompetensi guru khususnya sekolah dasar di tingkat kecamatan.
- f) Sumber daya yang dilibatkan; lebih memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam setiap pelaksana pelayanan pendidikan di wilayah.
- g) Kekuasaan, kepentingan dan aktor yang terlibat di dalam pelaksana implementasi kebijakan Otsus bidang pendidikan dasar, dari pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan maupun penerima manfaat dari kebijakan tersebut.
- h) Karakteristik lembaga dan penguasa; Dinas Pendidikan dan Pengajaran lebih fokus dalam dalam pelaksanaan dan pengawasan pelayanan pendidikan di lapangan.
- i) Kepatuhan dan daya tanggap; memaksimalkan daya tanggap dari masyarakat yang ada sehingga implementasi kebijakan Otsus bidang pendidikan mempunyai nilai lebih di mata masyarakat.

Kedua, faktor pendukung utama implementasi kebijakan Otsus dalam proses pelayanan publik bidang pendidikan dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw adalah pada APBD dan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari Otsus sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penambahan anggaran di setiap sekolah dasar.

Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan Otsus dalam proses pelayanan publik bidang pendidikan dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw adalah sebagai berikut.

- a) Minimnya anggaran Pendidikan
Dilakukan evaluasi anggaran Otsus untuk penambahan alokasi baik bagi setiap sekolah dasar agar dapat menjawab kebutuhan kebutuhan di wilayah.
- b) Mentalitas ASN dan Masyarakat.
Bagi aparatur sipil negara (ASN) perlu diberikan doktrin, pembinaan dan peringatan secara berkala sehingga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, bagi masyarakat dilakukan pendekatan secara persuasif serta sosialisasi pentingnya pendidikan.
- c) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
Pemerintah harus terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat lewat sosialisasi dan pemberitahuan lewat rapat-rapat di tingkat kampung maupun Distrik sehingga kesadaran akan pentingnya pendidikan akan tumbuh dan perkembangan bagi sebagian masyarakat yang belum memahami betul akan pentingnya pendidikan.
- d) Rendahnya kemampuan dan kompetensi aparatur sipil negara dalam hal ini tenaga pendidik untuk memberikan pelayanan pendidikan.
Juga perlu melakukan kegiatan Bimtek dan Diklat bagi para tenaga pendidik agar benar-benar memahami kurikulum baru yang dapat diajar sesuai dengan mutu pelajaran yang berkembang saat ini.
Ketiga, solusi mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Otsus dalam proses pelayanan publik bidang pendidikan dasar di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw.
- a) Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw untuk menaikkan anggaran pendidikan.
- b) Pemberian teguran/peringatan baik secara lisan maupun tertulis pembinaan dan sanksi tegas sesuai peraturan kepegawaian berlaku sementara masyarakat dilakukan pendekatan secara persuasif dan masyarakat masih banyak yang cuek menganggap pendidikan bukan sesuatu yang penting maka dari itu perlunya sosialisasi yang rutin dari dinas pendidikan.
- c) Pemerintah harus terus menerus melakukan sosialisasi di tingkat distrik agar masyarakat memahami dan terpenggil dalam peningkatan pelayanan pendidikan untuk kepentingan bersama.
- d) Pemberian kegiatan Bimtek dan Diklat khusus kepada tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu dan kualitas guru secara berkala di tiap sekolah dasar.
- e) Peningkatan fasilitas penunjang bagi tenaga pendidik, antara lain rumah dinas, air bersih serta kendaraan dinas yang mempermudah tenaga pendidik melakukan tugas dan tanggung jawab.
- f) Perlu adanya pendistribusian tenaga guru yang merata di setiap sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Idochi, 2004, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Alfabeta Bandung.
- Amirin, M. Tatang, 2000, *Menyusun rencana penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2003, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Barkley, George E. 1978, *The Craft Of Publik Administration*, Alin and Bacon, Inc.
- Creswell, Jhon W, 2014, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, SAGE Publication, Inc, California.
- Calhoun, C, c, Finch, A. V. 1997. *Vocational Education, Concept and Operation (2nd*

- ed). *Belmounth*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Dunn. William, N, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Effendi, Sofyan,. 2000, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Materi Kuliah*, MAP – UGM, Yogyakarta.
- Fukuyama, Francis, 2002, *Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran,- Terjemahan oleh Ruslani*, Qalam, Yogyakarta.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2001. *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Islami, Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Langevald, 1997. *Dalam Buku Kartono. Pengantar Ilmu mendidik Teoretis*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyana, Deddy, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2005, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nasution, AM, 2006, *Metode Research*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Osborne, David and Gaebler, ted, 1999, *Reinventing Government (Diterjemahkan Oleh Abdul Rosyid)*, Pustaka Binaman Pressindo Jakarta.
- Sinambela, 2014, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfa beta, Bandung.
- Tilaar, H. A. R, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta Jakarta.